

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia usaha, perbankan, pemerintahan maupun masyarakat menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu. Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang berperan penting dalam bidang ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan mempunyai manfaat yang penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun 2006), untuk mencapai suatu tujuan negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksaan yang profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Laporan keuangan suatu negara pada dasarnya harus dikelola secara bertanggungjawab transparan dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi saat ini pada sektor publik, yaitu tidak terlepas dari pandangan masyarakat sebagai sarang korupsi, kolusi, serta nepotisme, padahal sektor publik merupakan lembaga yang

menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik. Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan audit. Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan pemerintahan yang baik. Profesi auditor merupakan profesi dimana auditor melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 2007:1). Profesi auditor bertanggungjawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang handal.

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan oleh pihak ketiga, kecuali atas ijin kliennya, namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperoleh selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya. Tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga mutu profesionalnya, setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan obyektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya. (Ahmad alwani 2007).

Seorang akuntan publik harus menghasilkan kualitas audit yang baik, agar tumbuh rasa kepercayaan masyarakat kepada hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut, peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan keuangan tergantung pada independensi auditor.” (De Angelo (1981) dalam Alim et. Al:2010)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Parasayu (2014), ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu:

1. Obyektifitas, bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya.
2. Kompetensi, keahlian seorang auditor meliputi pengalaman dan pendidikan.
3. Pengetahuan auditor tentang audit, mengetahui secara keseluruhan proses audit dan standart audit.
4. Integritas, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.
5. Etika profesi, nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Profesi seorang auditor atau akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan pengauditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik atau auditor memperhatikan kualitas audit yang

dihasilkannya. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri atau dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Fenomena yang terjadi tentang kinerja audit yang lebih memilih kepentingan pribadi mereka, sehingga terjadilah penyimpangan dan pelanggaran standar audit dan kode etik auditor, seperti beberapa kasus yang terjadi pada auditor pemerintah berikut ini:

1. Jakarta, SP SKK Migas mempertanyakan kualitas temuan dan standar yang digunakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusul dikeluarkannya laporan audit BPK terhadap SKK Migas tahun 2015 dengan hasil tidak wajar (adverse). Ketua Umum SP SKK Migas Dedi Suryadi menegaskan, terjadi inkonsistensi terhadap hasil akhir audit BPK padahal materi yang menjadi temuan sama dengan temuan tahun-tahun sebelumnya dimana hasil audit BPK menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian. Dedi mengatakan, Apa-apa yang menjadi audit finding antara lain Hak-hak Pekerja yang terdiri dari PAP (Penghargaan atas Pengabdian), MPP (Masa Persiapan Pensiun), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan PUTD (Penghargaan Ulang Tahun Dinas), Pencatatan Pesangon, Abandonment & Site Restoration (ASR) merupakan temuan rutin dari Auditor dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya temuan tersebut sudah kami jawab

dan klarifikasi. Dedi menegaskan pihaknya menghormati atas opini yang dikeluarkan oleh BPK dan mengerti opini tersebut bersifat final.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini tidak wajar (TW/ Adverse opinion) dalam laporan keuangan 2015 kepada SKK Migas, pemberian Opini Tidak Wajar ini merupakan yang pertama kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, setelah sebelumnya SKK Migas selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Hariyanto).

<http://indonesianindustry.com>

2. Jakarta - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap RS Sumber Waras diragukan kualitasnya. Karena diduga menggunakan data yang tidak kompeten. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Tentang audit investigasi yang dilakukan BPK, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, “Audit yang dilakukan BPK atas lahan RS Sumber Waras, mengindikasikan adanya upaya memutarbalikkan fakta dan merusak independensi dan profesionalisme BPK untuk memenuhi harapan pihak lain,”. Petrus menegaskan, sejumlah fakta bisa diangkat sebagai indikator di mana BPK menanggalkan profesionalismenya, mengesampingkan standar pemeriksaan yang seharusnya menjadi pedoman. fakta tersebut adalah BPK dengan sengaja masih menggunakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang sudah diubah dengan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, untuk

mendapatkan opini atau kesimpulan telah terjadi pelanggaran hukum. BPK justru menutup-nutupi atau mengabaikan ketentuan Pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014, karena Pasal ini dengan tegas menyebutkan, demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah lima ha, dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. BPK tetap menggunakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (yang sudah dicabut). Berdasarkan fakta tersebut BPK sesungguhnya hanya mengejar target untuk menghasilkan opini atau kesimpulan tentang adanya pelanggaran hukum dan adanya kerugian negara, dengan mengabaikan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). ([www.suarainvestor.com](http://www.suarainvestor.com))

3. Jakarta - Menkeu Agus Martowardojo mengkritik hasil audit investigatif Hambalang. Ternyata hasil audit tidak sebagus yang dia bayangkan. Laporan audit hasil pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak baik. Agus dalam audit itu dianggap lalai dalam pemberian izin pengucuran dana. Disebutkan dalam audit itu, izin Agus dianggap lalai karena belum ada persetujuan dari Menteri PU. "Berdasarkan fakta yang ada, atau hasil wawancara dengan saya selama 20 menit, tetapi kesimpulannya tidak kelihatan ada satu akurasi hasil laporan yang lengkap dan baik," imbuhnya. Agus melihat hasil audit itu tidak seperti yang disebut sebagai audit investigasi (**ndr/nrl**). ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com))

4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) digugat oleh salah satu petinggi rekanan PT PLN dalam proyek pengadaan barang dan jasa *life time extension* (LTE ) *gas turbine* (GT) 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan. Bahalwan menggugat BPKP terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan. Ia menilai Laporan yang dikeluarkan BPKP dinilai cacat hukum karena BPKP secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan laporan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar. kliennya menggugat Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi dan Tim Audit BPKP yang menerbitkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) terkait kasus dugaan korupsi di PLTGU Belawan. (<http://bisnis.liputan6.com>)
5. [Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\)](#) memeriksa mantan Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, [Hamonangan Simarmata](#). Simarmata diperiksa terkait suap penyalahgunaan anggaran Jamkesmas Dinkes Kabupaten [Subang](#) yang menjerat JPU Kejati Jawa Barat Devianty Rochaeni. Penyidik juga memeriksa Kepala Sub Auditoriat Jawa Barat III BPK Perwakilan Jawa Barat Thomas IPoeng Andjar dan Bagian Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Dorlan Purba. Sebelumnya, KPK menyita Rp 528 juta dari ruangan kerja jaksa penuntut umum Devianty Rochaeni di Kejaksaan

Tinggi Jawa Barat. Uang tersebut diduga berasal dari Bupati [Subang](#) Ojang Sohandi. (<http://www.tribunnews.com>)

Kasus yang terjadi pada fenomena diatas dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas audit. Jika kualitas audit sektor publik tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Irawati, 2011). Sementara itu, jika kualitas audit sektor publik rendah maka akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran (Queena, 2012) dalam Eveline (2015). Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, auditor harus memiliki sikap independen serta memiliki pengalaman. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2013:26-27). Penerapan independensi menjadikan auditor lebih memperhatikan tanggungjawabannya kepada organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Tingkat independen yang rendah akan membuat seorang auditor akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, selain itu para auditor harus mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan



mereka (Arens, 2012:5), serta salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, integritas, dan lain sebagainya. (Abdul Halim, 2015:29). Oleh karena itu diharapkan dengan semakin tinggi tingkat independen seorang auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Adapun tentang pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi (Mulyadi, 2013:24). Pengalaman auditor merupakan salah satu faktor dari kompetensi auditor, dalam standar umum pertama point ketiga dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalismenya dengan cernat dan saksama (Standar Profesional Akuntan publik, 2011:230). Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengalaman. Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan (Tubbs, 1992 dalam Mayangsari, 2003). Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin peka seorang auditor terhadap kesalahan yang ditemukan. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman lebih baik, mereka mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan, serta dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby dan Frederick, 1990 dalam Mansouri et.al, 2009:18). Oleh karena itu diharapkan dengan semakin tinggi pengalaman auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Adapun selain teori yang menjelaskan kualitas Audit, ada beberapa penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Dengan mengambil sampel 4 KAP “Big Four” yang ada di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan juga oleh Penelitian Nungky Nurmalita Sari (2011) tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, terdapat pengaruh positif antara variabel Kompetensi, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi. Semakin tinggi tingkat Kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat auditor dalam menghasilkan Kualitas Audit yang akurat. Variabel Pengalaman Kerja menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman auditor melakukan kegiatan audit maka tingkat auditor dalam menghasilkan Kualitas Audit semakin akurat. Dan variabel Etika dan Independensi menunjukkan bahwa semakin tinggi auditor menjaga sikap tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam mengambil keputusan maka semakin akurat tingkat Kualitas Audit yang dihasilkan.

Selanjutnya penelitian mengenai topik kinerja audit juga dilakukan oleh Nur Samsi, Akhmad Riduwan, dan Bambang Suryono (2013) tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana pengalaman auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan independensi pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengalaman auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik.
  - c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Independensi Auditor, Pengalaman Auditor, dan Kualitas Audit.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Independensi Auditor, Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Bandung.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Inspektorat Kota Bandung guna meningkatkan kualitas audit dalam pemeriksaan keuangan di Kota Bandung.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Bandung.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Independensi, Pengalaman Auditor, dan Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Bandung. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Independensi, Pengalaman Auditor, terhadap Kualitas Audit.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dimulai pada bulan desember sampai selesai.